

# **SKRIPSI**

## **FENOMENA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN BUPATIDAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI DESA BABAT KECAMATAN PENUKAL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**



**SULARTI KURNIASI  
07021281823085**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2022**

# **SKRIPSI**

## **FENOMENA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN BUPATIDAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI DESA BABAT KECAMATAN PENUKAL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



**SULARTI KURNIASI**  
**07021281823085**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“FENOMENA POLITIK UANG PADA SAAT PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI DESA BABAT  
KECAMATAN PENUKAL KABUPATEN PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1**

Oleh :

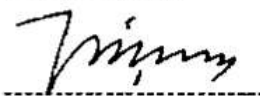
**Sularti Kurniasi**

**07021281823085**

Pembimbing I

1. Dr. Zulfikri Suleman, MA  
NIP. 195907201985031002

Tanda Tangan



Tanggal

14-09-2022

Pembimbing II

2. Dr. Ridhah Taqwa  
NIP. 196612311993031018



22-09-2022

Mengetahui  
Ketua Jurusan Sosiologi



**Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si**  
NIP. 1980021120312203

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“FENOMENA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI DESA BABAT  
KECAMATAN PENUKAL KABUPATEN PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR”**

Skripsi

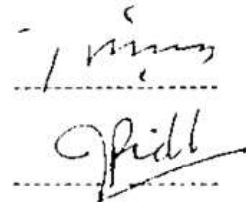
**SULARTI KURNIASI**  
07021281823085

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 07 Oktober 2022

Pembimbing :

1. Dr. Zulfikri Suleman, MA  
NIP.19590720 1985031002
2. Dr. Ridhah Laqwa, M. Si  
NIP.196612311993031018

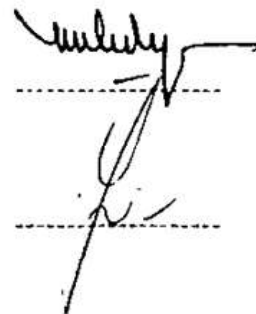
Tanda Tangan



Penguji :

1. Dra. Eva Lidya, M.Si  
NIP. 195910241985032002
2. Yulasteriyani, S.Sos, M.Sos  
NIP. 199206062019032025

Tanda Tangan



Mengetahui,



Dekan FISIP UNSRI

Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Sosiologi

Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si  
NIP. 198002112003122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, TEKNOLOGI DAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

---

**PERNYATAAN ORISIONLITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sularti Kurniasi

NIM : 07021281823085

Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya yang berjudul "Fenomena Politik Uang Pada Saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir" ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 28 September 2022

Yang buat pernyataan,



Sularti Kurniasi

NIM. 07021281823085

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan engkau.”

Ar-Rum:60

Dengan mengharap ridho Allah *Subhanahu wa ta'ala* skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak tersayang
2. Mbak, Sully Arditha Maharani
3. Adik, Salma Triya Ramadan dan Sahirah
4. Keluarga Besar Musmin dan H. Sucipto
5. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA dan Bapak Dr. Ridhah Taqwa, M.Si
6. Teman-teman SD, SMP, SMA dan Kuliah
7. Universitas Sriwijaya dan Almamater tercinta

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh. Alhamdulillahilladzi bini"matihi tatimmush sholihaat. Puji syukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta"ala yang memberikan kemudahan, kekuatan dan kesehatan serta kebahagiaan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dengan judul "Fenomena Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir", sehingga dapat diselesaikan oleh penulis dengan tepat waktu. Selanjutnya shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Adapun dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada:

1. Teruntuk orang tuaku, Ibu Sri Hartatik dan Bapak Sumaryadi tersayang terimakasih tak terhingga untuk semua yang telah diberikan dukungan dan nasihat serta do'a kepada penulis sehingga menambah semangat untuk terus bertahan kuat menyelesaikan skripsi ini serta mewujudkan cita-cita penulis. Semoga Allah Subhanahu wa ta"ala selalu memberikan kalian berdua kesehatan, kebahagiaan, kemudahan dalam segala hal dan akan selalu menemani penulis hingga sukses. Aamiin.
2. Teruntuk Saudaraku, Sully Arditha Maharani, Salma Triya Ramadan, dan Sahira yang selalu memberikan support, kebahagiaan, dan energi semangat dari awal kuliah hingga selesai.
3. Keluarga Besar Bapak Musmin dan H. Sucipto yang tidak bisa saya sebutkan satu per-satu. Terima kasih Kalian selalu memberikan support, bantuan dan

semangat serta seringkali menyempatkan waktu berkunjung dengan penulis di rantauan selama kuliah.

4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya

5. Bapak Prof. Dr. Alfitri. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajarannya

6. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si selaku ketua jurusan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

7. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos., MA selaku sekertaris jurusan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA selaku dosen pembimbing I yang telah sabar memberikan banyak bantuan, arahan dan masukan serta kelancaran dalam proses menyelesaikan skripsi.

9. Bapak Dr. Ridhah Taqwa, M.Si selaku dosen pembimbing II dan dosen Pembimbing Akademik yang telah sabar dalam memberikan bantuan, arahan dan masukan serta kelancaran dalam penyempurnaan skripsi ini.

10. Seluruh dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai bahan yang dapat digunakan penulis selama masa perkuliahan dan pasca kampus.

11. Bapak dan Ibu staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memudahkan jalannya pemberkasan selama di kampus.

12. Kepada Mbak Yuni Yunita, S.Sos selaku admin jurusan sosiologi yang telah banyak membantu penulis dalam hal administrasi jurusan.

13. Seluruh informan, Ibu, Bapak, Kakak, dan Ayuk di Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang telah bersedia memberikan informasi secara terbuka kepada penulis selama pengumpulan data dalam proses menyelesaikan skripsi ini.



14. Teruntuk Adikku Robert Andreo dan Bella Kharisma, Terima kasih banyak sudah membantu dan menemani penulis selama penelitian di lapangan. Semoga kebaikan kalian diberikan balasan pahala tak terhingga oleh Allah SWT.

15. Ibu dan Bapak Dwi Anugrah, yang selalu memberikan nasihat, dukungan dan semangat kepada penulis selama berada di perantauan. Semoga kebaikan kalian semua Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan dengan pahala yang tak terhingga. Aamiin.

16. Semua teman-teman angkatan 2018 yang memberikan warna selama masa perkuliah di Universitas Sriwijaya, khususnya kelas ganjil jurusan sosiologi 2018.

17. Teruntuk Sahabat sekaligus saudaraku, Dwi Anugrah terima kasih banyak selalu kebersamai keseharian penulis disaat suka maupun duka selama menyelesaikan skripsi dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga kebersamaan dan hubungan baik ini selalu terjaga sampai kapanpun. Semoga setiap langkah kerja keras kita menjadi berkah dan mengantarkan kita semua untuk sukses pasca kampus.

18. Teruntuk teman-teman baikku, Millennia, Nadia, Fadila, Nurria, Bella Monicha, Selly, Asmaul, Theodora, Nuradiva, Lingga, Annisa Amalia, Fatma, Hernita, Imelda, Sinta, Novia, Iqbal, Kiki, Nevri, Polaria, Rayona, Rudi, Putri Delana, terimakasih banyak selalu memberikan semangat untuk bertahan kuliah dari awal hingga selesai.

19. Teman-teman sekolahku, Mira Wulandari, Imel Oktarian, Rima Suci, Risky Yunita, Neri Sundari, Sindi Ulandari, yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi hingga selesai

20. Sahabat Kecilku, Testa Anggraeni, Mira Elvina, Annisa Ramadani, Fitri Anggraini, yang selalu menanti penulis disetiap libur semester, selalu memberikan kesan bahagia setiap penulis pulang kampung.

21. Terima kasih untuk diri sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk lebih baik lagi sangat dibutuhkan guna memperbaiki skripsi ini di kemudian hari, semoga

skripsi ini dapat berguna bagi semua orang yang membacanya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indralaya, Oktober 2022  
Penulis,

Sularti Kurniasi  
07021281823085

**RINGKASAN**  
**FENOMENA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI TAHUN 2020 DI DESA BABAT KECAMATAN PENUKAL**  
**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

Penelitian ini berjudul "Fenomena Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir". Masalah dalam penelitian ini adalah adanya kecenderungan politik uang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Desa Babat Kecamatan Penukal yang dilihat berdasarkan data hasil suara pada pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses politik uang menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan Faktor penyebab terjadinya politik uang pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan strategi penelitian fenomenologi. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan 15 informan, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya dianalisis menggunakan teori George Caspar Homans dan Peter M. Blau mengenai pertukaran sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses politik uang menjelang pemilihan dapat dilakukan secara langsung melalui para calon yang datang berkunjung atau blusukan ke desa-desa dan juga dapat dilakukan secara tidak langsung melalui tim sukses mereka masing-masing. Faktor penyebab terjadinya politik uang pada pemilihan bupati dan wakil bupati dikarenakan faktor kebiasaan konstituen menerima politik uang setiap adanya pemilihan umum dan faktor rendahnya ekonomi masyarakat.

**Kata Kunci:** Calon Bupati dan Wakil Bupati, Politik Uang, Konstituen, Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Indralaya, 07 Oktober 2022

Mengetahui

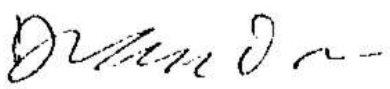
**Pembimbing I**

  
**Dr. Zulfikri Suleman, MA**  
 NIP.19590720 1985031002

**Pembimbing II**

  
**Dr. Ridhah Taqwa, M.Si**  
 NIP.196612311993031018

**Ketua Jurusan Sosiologi**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si**  
 NIP. 198002112003122003

**SUMMARY**  
**THE PHENOMENON OF MONEY POLITICS DURING THE 2020 REGENT AND DEPUTY REGENT ELECTIONS IN BABAT VILLAGE, PENUKAL DISTRICT, PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR REGENCY**


*This research is entitled "The Phenomenon of Money Politics during the 2020 Regent and Deputy Regent Elections in Babat Village, Penukal District, Penukal Abab Lematang Ilir Regency". The problem in this study is the tendency of money politics in the election of regents and deputy regents in Babat Village, Penukal District, which is seen based on data on vote results in the 2020 Regional Head general election. This study aims to determine the process of money politics ahead of the 2020 regional head elections and the factors causing money politics in the 2020 regent and deputy regent elections. This research uses qualitative descriptive research methods and phenomenological research strategies. Data collection was obtained through in-depth interviews with 15 informants, documentation and literature studies. Further analyzed using George C Homans' theory regarding social exchange. The results of this study indicate that the money politics process before the election can be carried out directly through candidates who come to visit or visit villages and can also be done indirectly through their respective success teams. The factors that cause money politics in the election of regents and deputy regents are due to the habit of constituents accepting money politics every time there is a general election and the low economic factor of the community.*

**Keywords: Candidates for Regent and Deputy Regent, Money Politics, Constituents, Regional Head General Election.**

Indralaya, 07 Oktober 2022  
Mengetahui

*Advisor I*

*Advisor II*



**Dr. Zulfikri Suleman, MA**  
NIP.19590720 1985031002



**Dr. Ridhah Taqwa, M. Si**  
NIP.196612311993031018

**Head of Departement Sociology**  
**Faculty Social and Political Sciences**  
**University Sriwijaya**



**Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si**  
NIP. 198002112003122003

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b><i>SUMMARY</i>.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.3.1 Tujuan Umum .....	9
1.3.2 Tujuan Khusus .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Teoritik .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>10</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Kerangka Pemikiran.....	14
2.2.1 Politik uang .....	14
2.2.2 Strategi Politik uang.....	15
2.2.3 Bentuk-bentuk Politik uang.....	16
2.2.4 Pemilihan Umum .....	17
2.2.5 Pemilihan Kepala Daerah.....	18
2.2.6 Teori Pertukaran Sosial .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
3.1 Desain Penelitian.....	22
3.2 Lokasi Penelitian.....	22
3.3 Strategi Penelitian .....	23
3.4 Fokus Penelitian .....	23
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.6 Penentuan Informan .....	25
3.7 Peranan Peneliti.....	26

3.8 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.9 Unit Analisis.....	29
3.10 Teknik Analisis Data.....	29
3.11 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data .....	31
3.12 Jadwal Penelitian.....	32
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.....	33
4.1.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten PALI .....	35
4.1.2 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Ijazah Tertinggi ....	35
4.1.3 Angka Melek Huruf Kabupaten PALI.....	36
4.2 Gambaran Umum Desa Babat.....	37
4.2.1 Sejarah Desa Babat.....	37
4.2.2 Letak Geografis dan Luas Wilayah Desa Babat .....	42
4.2.3 Pekerjaan dan Jumlah penduduk di Desa Babat .....	42
4.2.4 Pendidikan di Desa Babat.....	43
4.3 Gambaran Umum Informan Penelitian .....	44
4.3.1 Informan Utama.....	44
4.3.2 Informan Kunci.....	51
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
5.1 Proses Politik Uang pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020....	55
5.1.1 Proses Perkenalan Para Calon Bupati Kepada Masyarakat Menjelang Pemilihan .....	56
5.1.2 Proses Pendekatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepada Masyarakat Menjelang Pemilihan.....	59
5.1.3 Proses Pemberian Politik Uang Yang Dilakukan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjelang Pemilihan .....	63
5.2 Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.....	66
5.2.1 Faktor Kebiasaan Masyarakat Menerima Uang Menjelang Pemilihan .....	68
5.2.2 Faktor Rendahnya Ekonomi Masyarakat Desa .....	70
5.3 Analisis Menggunakan Teori Pertukaran Sosial .....	73
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
6.1 Kesimpulan .....	75
6.2 Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu.....	11
<b>Tabel 3.1</b> Fokus Penelitian .....	19
<b>Tabel 3.2</b> Jadwal Penelitian .....	25
<b>Tabel 4.1</b> Luas wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir .....	35
<b>Tabel 4.1.1</b> Perkembangan Penduduk Miskin... ..	35
<b>Tabel 4.1.2</b> Jumlah Penduduk Berdasarkan Ijazah Tertinggi.....	35
<b>Tabel 4.1.3</b> Angka Melek Huruf Kabupaten PALI.....	35
<b>Tabel 4.2.3</b> Pekerjaan dan Jumlah Penduduk Desa Babat.....	41
<b>Tabel 4.2.4</b> Jenjang Pendidikan di Desa Babat.....	41
<b>Tabel 4.3.1</b> Daftar Informan Utama .....	43
<b>Tabel 4.3.1</b> Identitas Informan Kunci.....	49
<b>Tabel 5.1</b> Proses Politik Uang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Menjelang Pemilihan .....	64
<b>Tabel 5.2</b> Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang Menjelang Pemilihan .....	70

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1.1</b> Kerangka Pemikiran.....	19
<b>Bagan 5.1</b> Proses Politik Uang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.....	54
<b>Bagan 5.2</b> Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati .....	66



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir .....	33
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi. Pemilihan umum dianggap sebagai salah satu tolak ukur dari adanya paham demokrasi dalam sebuah negara, dengan prinsip-prinsip pemilihan umum yang sesuai dengan ketentuan yang ada seperti prinsip kehidupan berkedaulatan rakyat (demokrasi). Dengan didapati bahwa setiap warga negara berhak aktif dalam berpartisipasi setiap proses pengembangan, pengambilan dan perancangan suatu keputusan kenegaraan (Wou, 2018). Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang mendasar bagi sebuah sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan bentuk nyata dari adanya demokrasi yang dijadikan sebagai sarana bagi masyarakat dalam menyatakan wewenangnya kepada pemerintah dan negara (Fitriani, 2019).

Pemilihan umum atau sering disingkat pemilu merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun sekali sesuai ketentuan UU Nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang terdiri dari Komisi Pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi untuk memilih calon Presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati sampai calon kepala Desa dan wakil kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Komisi pemilihan umum atau sering disingkat KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu dalam penyelenggaraan pemilu ada yang namanya kampanye, kampanye ini adalah kegiatan calon kandidat atau pihak lain dalam mengenalkan para calon kandidat kepada pemilih serta menawarkan visi, misi, dan program-program yang ingin

dilaksanakan untuk menambah citra calon kandidat kepada masyarakat (UU Nomor 7 tahun 2017).

Pemilihan umum merupakan salah satu kegiatan yang diadakan dalam beberapa waktu tertentu di Pemerintahan Indonesia. Pemilu merupakan salah satu dasar yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem demokrasi di Indonesia dan juga merupakan salah satu bagian dari sistem demokrasi suatu negara. Salah satu bagian dari pemilu ialah Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang dilaksanakan dalam tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota dengan mempunyai sistem pemerintahannya sendiri. Sistem pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan dengan sistem proposional terbuka yang mana masyarakat dapat ikut serta dalam proses pemilihan atau penentuan calon-calon pejabat publik yang akan dipilih melalui suara terbanyak dan menempati kedudukan tertentu. Proses pemilihan umum tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan baik, setiap diadakan pemilihan umum baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Terkadang masyarakat kelas bawah sering kali dijadikan massa atau pendukung dengan menggunakan politik uang. Proses politik uang dapat diatur menggunakan strategi yang praktis dan handal dalam menarik perhatian masyarakat, agar banyak memperoleh dukungan suara dari masyarakat.

Proses politik uang ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui tim sukses pada saat proses kampanye berlangsung, dapat juga melalui kader atau pengurus partai politik, dan tokoh-tokoh masyarakat yang berada disekitaran wilayah pemilihan umum. Motif-motif dalam melakukan politik uang dapat dilakukan secara langsung dengan memberikan amplop yang berisi uang kepada masyarakat atau dengan memberikan barang seperti baju, sembako, kerudung dan lain sebagainya. atau bisa juga dengan menawarkan bantuan perbaikan infrastruktur seperti jalan, bangunan posyandu dan lain- lain, serta pemberian doorprize lainnya. Proses pemberiannya dapat dilakukan secara terang-terangan pada saat kampanye ataupun dengan cara sembunyi-sembunyi pada masa tenang, bahkan malam menjelang pemilihan umum yang sering disebut serangan fajar (Wou, 2018).

Intervensi uang dalam kehidupan politik merupakan fenomena yang sudah umum terjadi di Indonesia, hubungan mengenai aspek ekonomi dan politik ialah salah satu wujud dari adanya model pembangunan negara yang mematuhi sistem demokrasi sebab uang merupakan media atau cara yang sangat relevan dalam menguasai berbagai sumber daya. Hal inilah yang pada akhirnya dapat mencederai nilai-nilai demokrasi, akan tetapi masih banyak masyarakat yang bersikap secara rasional, yakni dengan tetap menerima sejumlah bantuan-bantuan yang diberikan calon kepala daerah seperti uang, sembako, dan barang lainnya tetapi pada akhirnya masyarakat tidak memilih calon kepala daerah tersebut sebab masyarakat memilih bukan hanya karena kesepakatan transaksional (Maemunah, 2016). Politik uang lebih rentan terjadi pada hari-hari atau jam-jam sebelum melaksanakan pemilihan atau bahkan saat hari pemilihan berlangsung. di Indonesia hal ini sering disebut dengan serangan fajar, sebuah istilah yang mencerminkan bahwa keuntungan material terutama uang tunai sebagai ganti dari hak suara dibagikan pagi hari pada saat hari pemungutan suara. Banyak calon dan tim sukses percaya bahwa makin dekat politik uang yang didistribusikan dari hari pemungutan suara, maka makin efektif politik uang dalam mempengaruhi pilihan masyarakat (Muhtadi, 2021 ).

Politik uang telah menjadi bagian integral politik elektoral di Indonesia tidak hanya pemilihan ditingkat pusat, tetapi juga ditingkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang terjadi sangat tinggi dikalangan pemilih. Melihat bahwa masyarakat kelas bawahlah yang lebih rentan terhadap tawaran-tawaran politik uang dibandingkan dengan masyarakat yang berada dikelas atas. Secara umum masyarakat yang memiliki minat politik yang tinggi diperkirakan lebih mendukung partai atau kandidat yang mengandalkan kampanye dalam kebijakan publik, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki pemahaman politik diperkirakan lebih tertarik dengan pemberian politik uang. Faktor sosial dan ekonomi, seperti tingkat pendapatan dan pendidikan mempengaruhi seberapa masif terjadinya politik uang didalam suatu daerah. Politik uang dapat diartikan sebagai jual beli suara yang sering didefinisikan sebagai transaksi atau tukar-menukar secara langsung, dalam hal ini masyarakat memberikan suara mereka

kepada calon kandidat dengan imbalan uang ataupun dapat berupa barang-barang (Muhtadi, 2021).

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pada pasal 515 menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihannya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihannya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta”. Selanjutnya dalam Pasal 523 menyatakan Ayat (1) “Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dlm pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)”. Ayat (2) “Setiap pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)”. Ayat (3) “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pada tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai politik uang dan pemberian imbalan untuk mengarahkan pilihan baik dalam pilkada maupun dalam pemilihan lainnya yaitu hukumnya haram. Permintaan dan pemberian imbalan dalam bentuk apapun terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik hukumnya haram dan termasuk *risywah* (suap). Adapun politik uang dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU), masuk dalam kategori *risywah* baik penerima atau pemberi, dua-duanya akan

dilaknat Allah SWT. Sebab pengertian *risywah* adalah harta yang diberikan seseorang kepada pemerintah, aparat negara ataupun pihak lainnya dengan tujuan memberikan keputusan yang menguntungkan pemberi suap. Disisi lain politik uang dapat menciptakan demokrasi artifisial, mengkhianati kepercayaan publik, dan menggerus nilai demokrasi. Politik uang akan merusak demokrasi dan dibutuhkan upaya kolektif untuk mengatasi politik uang (Wardhana, 2020)

Pelarangan politik uang ditegaskan bahwa setiap calon kandidat tidak diperbolehkan untuk menawarkan janji-janji dan membagikan hadiah baik berupa barang-barang maupun uang yang nantinya akan mempengaruhi preferensi pemilih. Dalam peraturan tersebut juga mengatur mengenai tindakan yang tidak diperbolehkan untuk calon kandidat dalam proses pelaksanaan kampanye ataupun pemilihan, pemungutan suara harus berdasarkan pada visi dan misi dari calon kandidat bupati dan wakil bupati bukan berdasarkan ganjaran ataupun janji-janji yang didapat. Maka dari itu tindakan politik uang dilarang dalam proses pelaksanaan kampanye dan pada saat pemilihan kepala daerah (Febrianto, 2020). Menurut Brusco (dalam Muhtadi, 2021) politik uang dapat didefinisikan sebagai sebuah penawaran kepada pemilih dari partai politik, baik yang sedang berkuasa maupun oposisi, dalam bentuk uang tunai atau lebih umum dalam bentuk sembako dengan imbalan suara penerima. Perkembangan demokrasi di Indonesia banyak dinodai oleh maraknya beragam bentuk distribusi kecurangan politik uang, terutama jual beli suara. Hal ini terutama terjadi sejak sistem pemilu proposional terbuka, sehingga sistem pemilu yang seperti itu akan memperburuk akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi dan representasi kebijakan di Indonesia. Salah satu kriteria penting dalam kualitas demokrasi adalah adanya pemilu yang bebas dan kompetitif.

Pelaksanaan pemilihan umum secara berjenjang dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, hingga pemilihan kepala Desa secara langsung. Pemilihan kepala daerah mencakup pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati,serta walikota dan wakil walikota(Muhtadi, 2021). Pada tahun 2020 dilakukan pilkada serentak di 270 wilayah di Indonesia meliputi, 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. (Aida,

2020). Salah satunya di daerah Sumatera Selatan, Sumatera Selatan melakukan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di 6 daerah antara lain, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pilkada serentak dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020, di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menghadirkan 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati yaitu pasangan calon nomor urut 1 Devi Herianto dan wakilnya Darmadi Suhaimi dan pasangan calon nomor urut 2 merupakan pasangan bertahan Heri Amalindo dengan menggadeng wakilnya Soemarjono (Putra,2020). Kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut Devi Herianto dan Darmadi Suhalmi, menggandeng tiga partai yaitu partai Demokrat, PAN, dan Hanura. Sementara itu, pasangan kedua adalah Heri Amalindo yang merupakan bupati bertahan dengan menarik Soemarjono sebagai wakil bupatinya. Dengan menggandeng sembilan partai yaitu partai PDIP, Golkar, PKS, PPP, Nasdem, Garindra, PBB, Perindo dan PKB (Hernanta, 2020).

Pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam penyelenggaraan pemilihan saling bersaing dalam menarik perhatian dan simpati dari masyarakat, salah satunya dengan cara melakukan politik uang kepada masyarakat baik masyarakat kelas bawah maupun kelas atas sekalipun. Bentuk dalam politik uang yang diberikan dapat berupa uang tunai, sembako, baju dan lain sebagainya. Selain itu politik uang dapat juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosial yang biasanya dilakukan di beberapa desa seperti kegiatan sosial menanam pohon ibu-ibu PKK, kegiatan pengajian rutin dan lain sebagainya.

Penyebab dari adanya politik uang pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini menimbulkan permasalahan dalam proses pemilihan umum seperti gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut satu Devi Harianto dan wakilnya Darmadi Suhaimi, gugatan tersebut menolak hasil rapat pleno yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Desember 2020 lalu. hasil rapat pleno yang di umumkan oleh KPU(Komisi Pemilihan Umum) Pali

yaitu paslon atau Pasangan Calon 1. Devi Herianto dan Darmadi Suhalmi memperoleh suara sebanyak 51.205 dan paslon 2. Heri Amalindo dan Soemarjono memperoleh suara sebanyak 51.863. Akan tetapi paslon 1 tidak menerima hasil rapat pleno yang diumumkan oleh KPU Pali, karena pihak paslon 1 tidak menerima data pemilihan per TPS oleh pihak KPU dan dicurigai adanya permainan politik di beberapa daerah, akhirnya paslon 1 mengajukan gugatan kepada MK mengenai hasil rapat pleno dengan kemudian, MK membatalkan pasangan calon bertahan Heri Amalindo dan Soemarjono menjadi Bupati dan wakil bupati.

Dalam putusan MK pada saat sidang yang disiarkan secara virtual melalui akun media sosial Mahkamah Konstitusi dengan hasil MK mengabulkan gugatan termohon pasangan calon nomor urut satu Devi Herianto dan wakilnya Darmadi Suhaimi terhadap KPU. Dengan fakta yang didapat pada saat persidangan, bahwa MK menemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada Desember 2020 lalu. MK memutuskan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditemukan pelanggaran adapun 4 TPS tersebut yaitu TPS Enam kelurahan Tempirai, TPS delapan kelurahan Babat, TPS 9 dan TPS sepuluh di Kelurahan Air Itam. Di 4 daerah tersebut, terdapat selisih suara sebanyak 658 suara dari keseluruhan sebanyak 800 suara. Selain terjadinya politik uang, MK juga menemukan fakta bahwa adanya pemilih ganda dalam pelaksanaan Pilkada 2020 lalu. Hal ini dapat terungkap karena berdasarkan dua saksi yang hadir pada saat persidangan (Putra, 2020).

Masyarakat dapat dikatakan sudah berpengalaman dalam pelaksanaan pemilihan umum secara langsung. Setidaknya dalam waktu lima tahun sekali masyarakat mengikuti beberapa pemilihan diantaranya yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan kepala Desa. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sebagian besar sebagai konstituen (Rozy, 2019). Pada proses penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati 9 desember 2020 tidak semuanya dapat berjalan dengan baik, masih banyak terdapat kendala dan kecurangan-



kecurangan. Salah satunya kecurangan dalam bentuk politik uang seperti menggerakkan kepala Desa dan tenaga honorer untuk berkampanye, melakukan serangan fajar pada saat massa tenang atau malam menjelang pemilihan yang dapat berbentuk uang tunai, sembako, baju dan lain sebagainya.

Pada dasarnya calon kepala daerah ataupun calon anggota legislatif memiliki sistem atau strategi sendiri dalam mendapatkan banyak dukungan suara dari masyarakat yakni, dengan melakukan praktek politik uang yang dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang dengan jumlah yang banyak. Dalam hal ini masyarakat sebagai konstituen dapat memiliki harga yang cukup tinggi untuk dipertaruhkan oleh calon kepala daerah dalam mendapatkan hak suara masyarakat. Politik uang sudah terjadi terus-menerus sehingga dapat dikatakan sudah menjadi budaya dan tradisi yang tidak dapat dipisahkan dalam Pilkada.

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, hal ini tentunya menarik untuk dikaji lebih jauh dengan ditinjau lebih dalam kembali mengenai bagaimana proses politik uang terjadi dalam masyarakat pada saat pelaksanaan pemilihan tersebut, apakah penyebab terjadinya politik uang di dalam masyarakat serta adakah indikator-indikator yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam memilih. Mengingat rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian peneliti tertarik untuk memilih permasalahan tersebut sebagai objek penelitian., maka dari itu peneliti mengajukan penelitian dengan judul “ **Fenomena Politik Uang Dalam Masyarakat Pada Saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses terjadinya politik uang menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati 2020?
2. Apa faktor penyebab terjadinya politik uang pada pemilihan bupati dan wakil bupati 2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan yang menjadi acuan dalam penelitian ini, sebagai berikut;

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui fenomena politik uang dalam masyarakat pada saat Pilkada yang telah dilakukan pada tahun 2020.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui proses terjadinya politik uang menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020.
2. Mengetahui faktor penyebab terjadinya politik uang dalam masyarakat pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam ilmu sosial. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritik**

Memberikan kontribusi dan dijadikan bahan acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi sosiologi di bidang Sosiologi Politik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para politisi tentang pentingnya *sportifitas* dalam meraup suara dalam pemilu agar nilai-nilai demokrasi tidak tercoret dan agar pelaku politik menyadari akan dampak tindakan politik uang.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat membangun kesadaran bagi masyarakat untuk mengetahui arti dari demokrasi itu sendiri agar tercipta pemilu yang sehat dan bebas dari kecurangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Berita

- Aida, N. R. (2020). Berikut Daftar 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/193100165/berikut-daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-9-desember-2020?page=all>. Di Akses pada 31 Mei 2022.
- Firmansyah. (2021). Laporan Data Demografi Desa Babat. Di Akses Pada 27 Juli 2020.
- Lestari, Intan Dwi. (2020). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, <http://Kpu.palikab.go.id>, di akses pada 20 Desember 2021.
- Putra, A. Y. (2020). Hasil Pleno KPU PALI, Pertahan Unggul Tipis, Paslon 01 Akan Ajukan Gugatan ke MK. <https://regional.kompas.com/read/2020/12/15/19260881/hasil-pleno-kpu-pali-petahana-unggul-tipis-paslon-01-akan-ajukan-gugatan-ke?page=all>. Di akses Pada 22 Mei 2022.

### Sumber Buku

- Aspinal, Edward. Berenschot, W (2020) *Democracy for sale*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Haboddin, M. dkk. (2017). *Ketika Mahasiswa Bicara Pilkada* (1st ed.). Malang: UB Press.
- Harnawansyah, M. F. (2019). *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Moelong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi 36). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, B. (2021). *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru* (3rd ed.). Jakarta: PT Gramedia.
- Sugiono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (26th ed.). Bandung: Alfabeta.Cv.

### Sumber Jurnal

- Asmuni, M. B. dkk. (2020). Faktor Politik Uang Dalam Perilaku Memilih Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Temanggung Tahun 2018. *Indonesia Governance journal*, 3(2).
- Basri, H. (2020). Pola Praktik Penggunaan Politik Uang dalam Pilkadaes di Kabupaten Sumenep (Studi fenomenologis transaksi politik dalam proses demokrasi lokal). *Jurnal Setia Pancasila*, 1(1), 51–64.
- Vikalista, E. dkk. (2021). Pemanfaatan Media Sosial untuk Iklan Kampanye Pasangan Calon Pada pemilihan Walikota Banjarmasin. *Journal of Communication Studies*, 7(1).
- Febrianto, I. W. dkk. (2020). Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Pilkada. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 110-115.
- Fitriani, L. U. dkk. (2019). Fenomena Politik Uang (Politik uang) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53–61.
- Hasan, A. E. (2019). Praktek Money Politik Pada Pilkada Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 (Studi Analisis Kecamatan Simpang Kanan). *Jurnal Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4(3), 1–12.
- Nabila, N. dkk. (2020). Pengaruh Politik uang Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Notarius*, 13(1), 138–153.
- Maemunah. dkk. (2016). Praktik Politik Uang Pada Pemilukada Serentak 2015(Studi Kasus Di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. *Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, 4(1), 21-26
- Marlinda. dkk. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Money Politic Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Muna Barat Tahun 2019. Universitas Halu Oleo Kendari.
- Ritonga, M. I. (2021). *Politik uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 (Studi Kasus: Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Desa Namolandur Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang)*. Universitas Sumatera Utara.
- Rohid, satya I. N. (2019). Politik Uang dan Pemilu Serentak 2019 di Tuban. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(2), 353–361.
- Rozy, F. dkk. (2020). Praktik Politik Uang Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul 2019. *Jurnal Of Sociology Research and Education*, 7(1), 37-44.
- Wou, A. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang (Politik uang) Dalam Setiap Pesta Demokrasi Di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Gema Kampus*, 13(1), 8–14.